KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

SENIN, 10 JANUARI 2022
EDISI ; 00226524/GBP/I/2022

KLIPING

Berita Pertanian

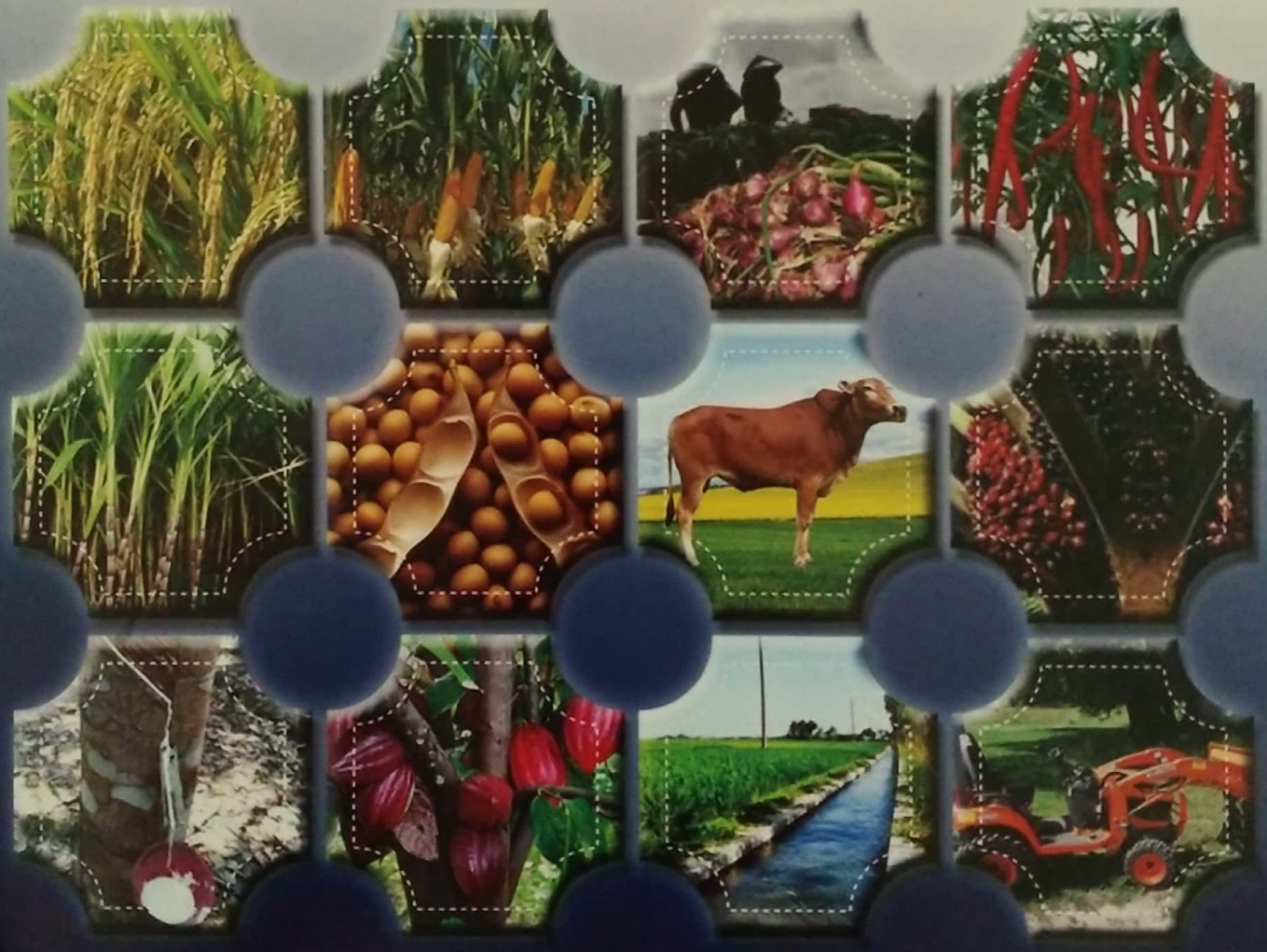

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-ip@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

Dipindai dengan CamScanner

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SENIN, 10 JANUARI 2022

I. **BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :**

1. **TANAMAN PANGAN :**
   - Agrowisata Dengan Sajian Pangan Lokal Berpotensi Untuk Dikembangkan (K)..... 1

2. **PERKEBUNAN :**
   - DPR Dukung Minyak Goreng Bersubsidi (R)..... 2
   - Pemprov Jatim Gelontorkan 75 Ribu Liter Migor (MI)..... 3
   - Urusan Minyak Goreng Awas, Digoreng-Goreng (RM)..... 4
   - Kadin Gotong Royong Turunkan Harga Migor (RM)..... 5
   - Senayan: Idealnya Rp 11 Ribu Per Liter (RM)..... 6
   - Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng (RM)..... 7-8
   - Minyak Goreng Masih Stabil Tinggi (BI)..... 9-10
   - Melalui PTPN, Kementerian BUMN Turut Turunkan Harga Migor (ID) 11-12
   - Operasi Pasar Saja Tidak Cukup (MI)..... 13-14
   - BUMN Siapkan 3,7 Juta Liter Minyak Goreng (R)..... 15-16

3. **PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :**
   - Pemberantasan Mafia Pupuk Didukung (MI)..... 17
   - Jaksa Agung Minta Mafia Pupuk Diberantas (MI)..... 18
   - Pemerintah Janji "Jinakkan" Harga (BI)..... 19-20

4. **KETAHANAN PANGAN :**
   - ASN Musi Banyuasin Wajib Konsumsi Beras Lokal (MI)..... 21
   - Puan: Segera Kendalikan Harga (RM)..... 22
   - Stok Pangan Mulai Tipis, Impor Pangan Dilirik (KN)..... 23-24

5. **PERTANIAN UMUM :**
   - Anggaran Petani Kudu Meningkat (RM)..... 25

oooooooo O ooooooo

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- [x] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [ ] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [x] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 8/1/2022
HALAMAN 9 /
RUBRIKASI

- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Agrowisata dengan Sajian Pangan Lokal Berpotensi untuk Dikembangkan

JAKARTA, KOMPAS — Agrowisata berpotensi menggeliat seiring naiknya tren berwisata di luar ruang selama pandemi Covid-19. Dengan menawarkan penganan lokal, ada nilai lebih bagi pengunjung yang akhirnya juga membagikan kesan dan pengalaman di media sosial. Strategi ini berdampak positif bagi perekonomian setempat.

Salah satu destinasi agrowisata adalah Daringan Kesongo Culture di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Memanfaatkan tanah kas desa yang tidak produktif, seluas 8.800 meter persegi, pemerintah desa membangun wisata kuliner di tepi sawah yang mulai beroperasi pada Agustus 2021. Destinasi itu juga menghadap Danau Rawa Pening.

Selain nuansa pematang sawah dan danau, pengunjung juga disajikan sejumlah penganan lokal, salah satunya oseng genjer atau paku rawa yang tumbuh subur di sana. Juga, ikan nila dan mujair yang ditangkap para nelayan Rawa Pening. Selain itu, disajikan pula olahan ubi, singkong, dan bunga teratai.

"Makanan yang kami tawarkan, 75 persen merupakan penganan lokal, juga dengan memberdayakan warga. Di tengah pekan, omzet sekitar Rp 5 juta, sedangkan akhir pekan sekitar Rp 25 juta," kata Kepala Desa Kesongo Supriyadi saat dihubungi, Jumat (7/1/2022).

Supriyadi menambahkan, ke depan, pengembangan akan terus dilakukan karena wisata di ruang terbuka tengah banyak diminati. Bahkan, Daringan Kesongo Culture mendapat promosi gratis dari pengalaman yang dibagikan pengunjung melalui media sosial. Pada ulasan di Google, misalnya, ada 253 ulasan dengan skor 4,5 dari 5.

Sekitar 3,5 kilometer ke arah utara dari Daringan Kesongo Culture terdapat Perkebunan dan Tlogo Resort Tuntang, yang dikelola Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), salah satu badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi Jateng. Menurut rencana, area itu akan dijadikan destinasi agrowisata yang dikoneksikan dengan *rest area* di Tol Semarang-Solo yang hendak dibangun. K/8/1/9

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jateng Peni Rahayu mengatakan, pembangunan *rest area* bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tersambungnya Tol Trans-Jawa. Menurut dia, izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dikantongi. Rencana induk pengembangan dan investor pun sudah ada.

"Nantinya akan terintegrasi antara *rest area* dan tempat wisata. Pengunjung *rest area* dapat berkeliling di area (perkebunan) Tlogo serta melihat Danau Rawa Pening dari ketinggian. Mudah-mudahan dapat segera diwujudkan," kata Peni, beberapa waktu lalu.

Edukasi

Sementara itu, di Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, terus berkembang Agro Edu Wisata Organik (AEWO). Keberlangsungan obyek itu, antara lain, berdampak pada peningkatan jumlah pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. Telah terserap 16 tenaga kerja di AEWO tersebut.

Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Mulyaharja, Imam Hanafi, mengatakan, AEWO tersebut telah memiliki 35 *homestay* yang dikelola masyarakat. Juga ada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik pedagang, pemilik warung, maupun penjual suvenir.

"Alhamdulillah dari Januari hingga Oktober 2021 ada sekitar 45.000 pengunjung. Dari penjualan tiket, pemasukan lebih kurang Rp 450 juta, sedangkan UMKM dan pendapatan lainnya sekitar Rp 500 juta," ujarnya dalam webinar Bimtek "Potensi AEW Tanaman Pangan sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Wilayah" yang digelar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Rabu (5/1).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dalam webinar itu menjelaskan, pihaknya terus mendorong pengembangan Agro Edu Wisata (AEW). Diharapkan terbangun dua aktivitas bersamaan, yakni agro dan wisat, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah.

"Akan ada unsur edukasi dan proses budidaya dengan beragam komoditasnya, juga hilirisasi. Jadi, secara tidak langsung, agrowisata ini menjadi promosi dan pemasaran yang efektif ke mancanegara. Obyek-obyek semacam ini agar digencarkan promosi produk pangan lokalnya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy, Selasa, mengatakan, seperti yang didorong pemerintah, konsentrasi pengembangan pariwisata saat ini terletak pada kunjungan wisatawan domestik. Pasalnya, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) belum pulih akibat merebaknya penularan virus korona varian Omicron.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pada Januari-November 2021 tercatat 1,48 juta kunjungan wisman atau anjlok 61,82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. Jumlah tersebut masih jauh dari Januari-November 2019 yang sebanyak 14,7 juta kunjungan wisman. Pemerintah menargetkan kunjungan wisman pada 2022 berkisar 1,8 juta-3,6 juta orang dengan perolehan devisa berkisar 470 juta dollar AS-1,7 miliar dollar AS. (DIT)

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [x] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 7 /
RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

DPR Dukung Minyak Goreng Bersubsidi

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, persoalan mahalnya harga minyak goreng sebuah ironi karena Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. DPR pun mendukung pemerintah untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi. R-7

Puan mencontohkan Malaysia, yang dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya. Malaysia menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp 8.500 per liter untuk kemasan sederhana. Dia pun berharap, pemerintah bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan, sehingga beban rakyat akan terbantu.

"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi tanpa kesulitan," kata Puan dalam keterangannya, Ahad (9/1).

Dia menyoroti tingginya harga minyak goreng sehingga menyarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Sebab, menurut Puan, hingga saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20 ribu per liter.

Selain itu, Puan mendukung langkah anak usaha *holding* perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit. INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp 14 ribu per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. "Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan pemerintah, yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga," ujarnya.

Puan berpesan agar minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran.

Selain mengendalikan harga minyak goreng, pemerintah juga diharapkan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok lainnya yang masih tinggi.

"Beberapa kebutuhan pokok, seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum stabil," katanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, berharap pemerintah dapat mematok harga minyak goreng yang telah disubsidi sebesar Rp 11 ribu per liter. Hal tersebut disampaikan Amin, menyikapi rencana pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen.

"Harga jual minyak goreng setelah disubsidi seharusnya tetap mengacu pada Permendag No 7 Tahun 2020, yang mengatur harga minyak goreng Rp 12.500 per kilogram atau sekitar Rp11 ribu per liter," kata Amin, akhir pekan lalu.

Amin juga meminta pemerintah berkomitmen pada rencana awal, yang akan menerapkan subsidi dua juta ton minyak goreng atau sekitar 25 persen dari total konsumsi minyak goreng nasional delapan juta ton per tahun. Menurut Amin, dana subsidi untuk minyak goreng tidak akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, dana subsidi yang diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), berasal dari pungutan ekspor produsen minyak sawit mentah (CPO) atau dikenal dengan CPO *supporting fund* (CSF).

■ antara **ed:** satria kartika yudha

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [x] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 8/1/2022
HALAMAN 8/1
RUBRIKASI

- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Pemprov Jatim Gelontor 75 Ribu Liter Migor

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 75 ribu liter minyak goreng (migor) di sejumlah wilayah Jatim untuk mendukung operasi pasar.

"Saat ini Pemprov Jatim menggelontorkan sebanyak 75 ribu liter minyak goreng. Semua dimanfaatkan untuk operasi pasar," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, kemarin.

Minyak goreng subsidi itu dibanderol dengan harga Rp12 ribu per kantong. Setiap konsumen diwajibkan membawa KTP sebagai syarat dengan maksimal pembelian dua kantong minyak. Khofifah menyampaikan saat ini Pemprov Jatim tengah menunggu pasokan minyak subsidi dari pemerintah pusat.

Kenaikan harga minyak goreng berimbas pada produsen keripik tempe di sentra industri tempe Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Mereka menuntut operasi pasar minyak goreng. Pasalnya sejak kenaikan harga pada November 2021, para produsen belum menerima bantuan, apalagi operasi pasar.

"Belum ada baik operasi pasar maupun bantuan subsidi apa pun dari pemerintah," tegas Reni Kurniawan, produsen keripik tempe Sanan Malang.

Hingga saat ini harga minyak goreng masih bertengger Rp20 ribu per liter. Dadang, pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, mengatakan kenaikan minyak goreng curah dan kemasan yang terjadi sekarang ini sudah merata di berbagai daerah.

"Minyak goreng curah awalnya dijual Rp11 ribu per liter kemudian naik menjadi Rp17.500 per liter, dan sekarang Rp20 ribu per liter. Harga minyak curah ini sama dengan harga minyak kemasan," ungkapnya.

Tingginya harga minyak goreng juga ditemukan di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang. MI/8/1/8

"Berdasar hasil pantauan harga pangan pokok yang dilakukan tim kita di sejumlah pasar tradisional, harga minyak goreng masih tinggi, berkisar Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Ruzuan Effendi. (FL/BN/AD/DW/N-1)

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [x] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 1 /

RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

SEKILO ADA YANG RP 20.000

Urusan Minyak Goreng Awas, Digoreng-goreng

MESKI sudah dilakukan operasi pasar, harga minyak goreng tetap ogah turun. Di pasar tradisional harganya masih Rp 20 ribuan. Pemerintah harus segera jinakkan harga minyak goreng karena rakyat sudah teriak. Jika tidak, nanti bisa "digoreng-goreng".

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Sabtu (8/1), harga minyak goreng curah di wilayah Jakarta masih dibanderol di harga Rp 26.500 per kilogram (kg). Di Bekasi Rp 20.000, Depok Rp 20.000, Tangerang Rp 20.000 dan Bogor Rp 20.500.

Sementara untuk harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di wilayah Jakarta juga masih dibanderol di harga Rp 26.500 per kg. Di Bekasi Rp 20.250, Depok Rp 21.500, Tangerang Rp 19.750 dan Bogor Rp 21.000.

Lalu untuk harga minyak goreng kemasan bermerk 2 di wilayah Jakarta dibanderol Rp 20.650 per kg. Sedangkan di Bekasi Rp 20.250, Depok Rp 19.900, Tangerang Rp 19.750 dan Bogor Rp 20.500.

Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, para pedagang juga kompak menjual minyak Rp 20.000 per kg baik kemasan maupun curah. Mereka membanderol harga minyak goreng selangit karena harga di agennya masih tinggi juga. RM/9/1/1

"Harga minyak lagi naik semua ini, per kg kalau yang 1 kg pol rata-rata 20 ribu paling murah itu dari harga 13 jadi 20 ribu," kata pedagang sembako di Pasar Warung Buncit, Lina, kemarin.

Masih mahalnya harga minyak goreng juga diakui pedagang sembako lain, Aan. Menurut Aan, dengan tingginya harga minyak goreng juga membuat pembeli enggan ke pasar. Aan berharap bahwa harga minyak goreng maupun bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari bisa normal kembali.

Pemerintah bukannya diam saja. Mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menjinakan harga minyak goreng. Salah satunya dengan memberikan subsidi harga.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 3,6 triliun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyediakan minyak goreng murah seharga Rp 14 ribu per liter selama 6 bulan ke depan sebanyak 1,2 miliar liter. Dana itu ditujukan untuk menutup selisih harga minyak goreng di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah beserta PPN.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bakal terus operasi pasar dengan mengguyur 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menggandeng 70 pelaku usaha di industri minyak goreng untuk menjamin pasokan dalam melaksanakan program minyak goreng murah.

Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut turun tangan. Dia mengatakan anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari, tengah mengembangkan turunan CPO. Salah satu produknya adalah minyak goreng kemasan ekonomis bermerek INL.

Menurut Erick produk minyak INL akan dijual seharga Rp 14 ribu per liter. Minyak goreng tersedia dalam dua kemasan, yakni 450 mililiter (ml) dan 900 ml.

Terkait lonjakan harga minyak goreng, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengusulkan, dibentuk aturan pemenuhan pasokan CPO untuk kepentingan dalam negeri alias *Domestic Market Obligation* (DMO). Ia juga usul agar diberlakukan bea keluar atau pajak ekspor produk turunan CPO.

Menurut Andre, menaikkan besaran pajak kepada eksportir minyak goreng dapat dilakukan sambil mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi terkait mekanisme DMO terhadap pengusaha sawit. Dengan naiknya bea keluar untuk produk turunan CPO seperti minyak goreng diharapkan kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng dapat terpenuhi dengan harga yang wajar.

Sementara, Peneliti Indef Sugiyono Madelan mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat menjinakkan harga minyak goreng. Jika harga minyak goreng tetap tinggi bakal bahan "gorengan" politik.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah telah berusaha mengendalikan harga CPO. Seperti membuat harga acuan setiap seminggu sekali. Namun, harga acuan CPO tersebut masih kurang efektif untuk mengendalikan harga minyak goreng.

Menurut Sugiyono, masalahnya terletak pada struktur pasar produksi CPO yang oligopolistik, yang dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. Demikian pula dengan struktur pasar minyak goreng, yang juga tidak bersaing sempurna, yaitu oligopolistik. Ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, memperbaiki dampak negatif terbentuknya struktur pasar dengan memberdayakan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua, pemerintah harus memiliki lembaga *bufer stock* untuk minyak goreng. ■ MEN

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☑ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 9 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Kadin Gotong Royong Turunkan Harga Migor

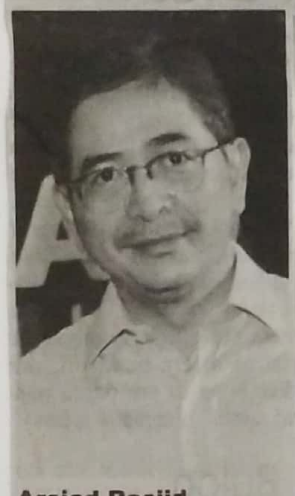

Arsjad Rasjid

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendukung langkah Pemerintah dalam menyediakan bahan pangan terjangkau.

Sesuai Surat Keputusan (SKK Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.42.4040 tahun 2006, minyak goreng (migor) termasuk di dalam kategori pangan, maka keterjangkauan dan stabilitas harga komoditas ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. RW/9/1/0

"Kadin Indonesia mendukung arahan Presiden Jokowi dan keluarnya kebijakan Pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri," tegasnya dalam keterangan resminya, Jumat (7/1).

Arsjad mengatakan, Kadin melalui Wakil Ketua Umum (WKU) Pertanian juga mendukung penguatan distribusi minyak goreng. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang lebih membutuhkan.

Bos Indika Energy ini juga berterima kasih kepada pelaku usaha dan petani kelapa sawit yang telah menyalurkan dana sawit melalui pungutan ekspor untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Sehingga sebagian dananya bisa dipakai untuk membantu operasi pasar.

"Selisih harga pada minyak goreng dapat digunakan untuk menutup selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) plus PPN harga minyak goreng kemasan sederhana untuk periode tertentu. Kami berharap hal ini dapat membantu membuat harga minyak goreng kembali terjangkau dan bisa distabilkan," tuturnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemberian subsidi menggunakan dana pungutan ekspor *crude palm oil* (CPO) merupakan kebijakan yang tepat. Karena, harga minyak goreng saat ini sangat dipengaruhi harga CPO dunia.

Menurutnya, kebijakan ini sangat penting dilakukan karena sasaran subsidinya adalah masyarakat kelas menengah bawah.

Namun, Sahat mengingatkan agar Pemerintah mempersiapkan mekanisme subsidi dengan cermat, terutama yang berkaitan dengan administrasi.

"Jika tidak, berpotensi dimanipulasi oleh produsen," ujarnya.

Sahat memperkirakan volume minyak goreng murah dari produsen bisa bertambah ke depannya, seiring dengan proyeksi harga CPO yang masih tinggi sampai pertengahan 2022.

Sahat meminta agar perusahaan perkebunan sawit terus berpartisipasi dalam menyediakan minyak goreng murah untuk pasar dalam negeri. ■ KPJ

"Kadin Indonesia mendukung arahan Presiden Jokowi dan keluarnya kebijakan Pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri."

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☑ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 9 / 1
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Senayan: Idealnya Rp 11 Ribu Per Liter

ANGGGOTA Komisi VI DPR Amin Ak menilai, harga minyak goreng kemasan sederhana yang dijual Pemerintah harusnya bisa di angka Rp 11.000 per liter.

"Ini mengacu pada Permendag Nomor 7/2020, yang mengatur harga minyak goreng Rp 12.500 per kilogram. Kalau diliterkan sekitar Rp 11.000 per liter," kata Amin, di Jakarta, Jumat (7/1).

Ia juga mempertanyakan rencana Pemerintah mensubsidi 2 juta ton minyak goreng curah atau sekitar 25 persen dari total konsumsi minyak goreng nasional 8 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, subsidi 1,2 miliar liter baru sekitar 900 ribu ton. Jumlah ini jauh di bawah rencana awal di angka 2 juta ton.

"Kalau pun subsidi diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun, atau dari 1,2 miliar liter menjadi 2,2 miliar liter, besaran subsidi hanya sekitar 1,8 juta ton atau masih lebih rendah dari rencana awal," papar politisi PKS itu.

Amin juga memastikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tidak terbebani dengan subsidi yang dikucurkan Pemerintah untuk minyak goreng ini.

Pasalnya, dana subsidi diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berasal dari pungutan ekspor, yang dipungut dari produsen minyak sawit mentah atau dikenal dengan *CPO Supporting Fund* (CSF).

Dana ini dibayarkan produsen CPO saat harga komoditas di atas 570 dolar AS per ton. Untuk diketahui, hingga 17 Desember 2021, BPDPKS berhasil menghimpun dana senilai Rp 69,72 triliun.

Selain itu, pada 2022 pendapatannya diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 triliun.

"Sehingga lebih dari cukup untuk menerapkan besaran subsidi sesuai komitmen awal," tegasnya.

Sementara, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafni mengatakan, dengan Pemerintah mengucurkan minyak goreng kemasan sederhana, akan menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang stabil.

"Namun Pemerintah juga harus menyusun strategi distribusinya dengan matang. Sehingga program ini benar-benar dapat mengurangi disparitas harga dan stok antar daerah yang terlampau jauh," kata Rahma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/1).

Ia melanjutkan, adanya kebijakan ini juga sangat membantu sektor usaha makanan dan minuman. Terutama yang berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengurangi *cost of production*.

"Dengan hadirnya minyak dengan harga terjangkau, akan tercapai efisiensi produksi di usaha makanan dan minuman yang di dominasi UMKM," tegas Rahma. ■ NOV

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [x] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 9 / 1
RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Pedagang Pasar Girang Pemerintah Beri Subsidi

Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng

Pedagang pasar gembira Pemerintah bakal menggelotorkan minyak goreng (migor) bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan bisa menstabilkan harga komoditas tersebut.

PEMERINTAH berencana mengucurkan migor kemasan sederhana bersubsidi dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga itu lebih rendah dari harga pasaran saat ini yang berkisar Rp 18.000 hingga 20.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyambut baik kebijakan Pemerintah itu. Menurutnya, segala upaya memang harus dilakukan Pemerintah demi menekan harga minyak yang masih tinggi di pasaran.

"Apa yang dilakukan Pemerintah sudah tepat, yang terpenting saat ini harga turun, tidak memberatkan pedagang dan masyarakat," kata Mansuri kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Ia berharap, migor kemasan sederhana ini digelontorkan ke pasar tradisional. Karena ujung harga jual minyak goreng berada di sana. RM/9/1/22

Airlangga Hartarto

Apakah pedagang dilibatkan dalam kebijakan ini? Mansuri mengaku, sampai saat ini IKAPPI belum menerima informasi terkait teknis pelaksanaan penyaluran minyak goreng kemasan sederhana ini.

"Kami tidak tahu nanti distribusinya seperti apa. Kita tunggu saja," tegas Mansuri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat. Dan, menciptakan stabilisasi harga migor di dalam negeri.

"Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan," kata Airlangga, dalam keterangan resminya, Kamis (6/1).

Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, biaya untuk menutup selisih harga, Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan biaya surveyor sebesar Rp 3,6 triliun akan diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selisih harga yang dimaksudnya adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Airlangga mengungkapkan, Pemerintah telah menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDPKS untuk mempercepat implementasi kebijakan ini.

Dirincikannya, Menteri Perdagangan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan, Menteri Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga

1

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☑ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 9 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

minyak goreng oleh BPDP KS. Pemungutan ini akan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDPKS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar, dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya.

"Mereka juga menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor Independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan," tegas Airlangga.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, inisiatif Pemerintah menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 14.000 per liter, sebagai bentuk menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak pangan masyarakat sebagai warga negara.

"Ini sangat baik dan kita apresiasi. Dengan langkah ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya minyak goreng dengan harga terjangkau di tengah kenaikan harga," kata Said kepada *Rakyat Merdeka*.

Namun begitu, KRKP menyarankan agar ke depan dilakukan perbaikan yang lebih sistematis. Sehingga, bentuk respons Pemerintah tidak hanya terjadi saat harga pangan sudah melambung tinggi seperti saat ini.

Said mengingatkan, jika sistem pangannya tidak diperkuat maka kondisi seperti saat ini akan berulang kembali.

"Sistem pangan yang kuat dan adil akan menguntungkan produsen, distributor dan konsumen. Ini memerlukan kebijakan dan kesungguhan Pemerintah," tegas Said. ■ NOV

2

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [x] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 7 /
RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

HARGA PANGAN POKOK

MINYAK GORENG MASIH STABIL TINGGI

Dinda Wulandari, Peni Widarti, & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

Bisnis, PALEMBANG — Harga minyak goreng di sejumlah daerah masih stabil tinggi kendati sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui operasi pasar. Kegiatan operasi pasar akan dilakukan sepanjang bulan ini guna menekan harga minyak goreng kemasan.

Berdasarkan pantauan *Bisnis* di Pasar Bukit Kecil Palembang, Jumat (7/1), harga minyak goreng berkisar Rp19.000—Rp20.000 per liter.

Di Jawa Timur, harga minyak goreng kemasan rata-rata Rp19.419 per liter. Harga tertinggi terjadi di Tulungagung Rp22.000 per liter dan terendah di Situbondo Rp16.000 per liter.

Sementara itu di Jakarta, harga minyak goreng di Pasar Tanah Abang Blok A—G pada akhir Desember 2021 Rp19.000 per liter. Harga tersebut naik signifikan dibandingkan dengan Oktober 2021 yakni Rp13.000 per liter.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatra Selatan Ruzuan Effendi mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng stabil tinggi selama dua pekan terakhir.

"Di sejumlah pasar tradisional, harga minyak goreng masih tinggi," katanya, Jumat (7/1).

Namun, dia meyakini bahwa adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga minyak goreng akan berdampak signifikan terhadap harga komoditas tersebut.

Pemerintah pusat berupaya mengendalikan harga minyak goreng dengan mendistribusikan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. "Semua mekanisme dan pelaksananya akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatra Selata Ahmad Rizali mengatakan upaya menstabilkan harga minyak goreng adalah dengan menggelar operasi pasar untuk pangan pokok di Sumsel.

Dalam operasi pasar tersebut nantinya harga minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Kegiatan operasi pasar berlangsung pada periode 12—31 Januari 2022 dengan menyediakan stok minyak goreng sebanyak 52 ton.

Terkait dengan operasi pasar tersebut, Pemprov Sulsel menggandeng pihak swasta yakni PT Indo Karya Internusa.

Adapun, jadwal pelaksanaan operasi pasar tersebut, yakni Pasar Alang-Alang Lebar pada 12 Januari, Pasar Kebon Semai pada 13 Januari, dan Pasar 10 Ulu pada 14 Januari.

Pasar Kenten Laut pada 19 Januari, Pasar Modern Plaju pada 20 Januari, dan Pasar Sekip Ujung pada 21 Januari.

Pasar 3–4 Ulu pada 25 Januari, Pasar 16 Ilir pada 26 Januari, Pasar Kertapati pada 27 Januari, Pasar Mas Krebet pada 28 Januari, Pasar Sako Sematang Borang, dan Pasar Yada pada 31 Januari.

Selain itu, di Pasar Gelumbang pada 24 Januari, Pasar Kayu Agung pada 17 Januari, dan Pasar Indralaya pada 18 Januari.

Sementara itu, upaya pengendalian harga minyak goreng juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelontorkan lebih dari 77.000 liter minyak goreng subsidi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan minyak goreng subsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat di sejumlah kota/kabupaten dijual dengan harga

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☑ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 7 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Rp14.000 per liter.

"Minyak goreng subsidi ini sudah didistribusikan oleh Disperindag Jatim dan kabupaten/kota sejak 14 Desember lalu sampai 4 Januari 2022 dengan total sebanyak 75.312 liter. Kemudian, ada tambahan lagi 2.000 liter untuk wilayah Sidoarjo 1.200 liter dan Surabaya 800 liter," jelasnya dikutip dalam rilis, Jumat (7/1).

Dia mengatakan bahwa tambahan pasokan minyak goreng subsidi sebanyak 2.000 liter tersebut juga diberikan tambahan subsidi Rp2.000 per liter sehingga harga jualnya menjadi Rp12.000 per liter

"Tapi dalam pembeliannya tetap dibatasi, maksimal hanya 2 liter, dan wajib membawa KTP sebagai syarat pembelian," katanya.

Khofifah berharap agar pemerintah pusat juga turut menghadirkan program serupa untuk membantu menstabilkan harga minyak goreng sehingga dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus diharapkan dapat menekan laju inflasi yang dalam 2 bulan terakhir ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng.

DKI JAKARTA

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan operasi pasar menyusul tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan operasi pasar akan dilaksanakan pekan ini.

Dalam beberapa hari terakhir, Pemprov DKI telah melaksanakan rapat persiapan operasi pasar.

"Mudah-mudahan minggu depan [pekan ini]. Namun, terkait dengan kepastiannya kapan, akan dirapatkan dulu," ujar Suharini di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/1).

Selain itu, sambungnya, perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) sektor pangan yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, juga membuat kemasan minyak goreng di bawah 2 liter dengan harga yang lebih murah.

Namun, Suharini belum mengetahui berapa harga minyak goreng dengan kemasan yang disesuaikan dengan kantong rakyat tersebut.

Dilaporkan sebelumnya bahwa lonjakan harga minyak goreng terjadi di banyak pasar di Jakarta pada periode akhir Oktober hingga pertengahan November 2021. Pada awal November, lonjakan harga minyak goreng mencapai puncaknya dengan menyentuh Rp20.000 per liter.

Harga minyak goreng bahkan sempat melambung hingga Rp21.000 di Pasar Tomang Barat pada pengujung Desember 2021. Lonjakan harga yang sama juga terjadi di Pasar Jembatan Lima menjelang pekan terakhir Desember 2021.

Dalam 3 bulan terakhir, harga minyak goreng di Jakarta mayoritas paling rendah berada di kisaran Rp15.000–Rp17.000 per liter. Terakhir, minyak goreng berada di harga tersebut menjelang pekan terakhir Oktober 2021. Namun, harga minyak goreng dalam kurun 3 bulan terakhir paling rendah di Pasar Paseban, yakni Rp12.000 pada awal Oktober 2021. ■

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK
- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA
- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [x] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 11 /
RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Melalui PTPN, Kementerian BUMN Turut Turunkan Harga Migor

JAKARTA – Kementerian BUMN melalui Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group turut menurunkan harga minyak goreng (migor) di Tanah Air. Anak usaha PTPN Group, PT Industri Nabati Lestari (INL), siap memasok migor kemasan sederhana sebanyak 3,75 juta liter pada Januari-Mei 2022 guna mengintervensi harga komoditas tersebut.

Oleh Tri Listiyarini 10 - 11

Menteri BUMN Erick Thohir telah meninjau operasi pasar (OP) tambahan untuk migor yang dilakukan PTPN Group di Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/1). OP tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan target 1,2 miliar liter migor. "Sesuai yang sudah diarahkan Bapak Presiden maka Kementerian BUMN dan PTPN melakukan OP tambahan, yang mana dari target sekitar 1,2 miliar liter kita juga akan kontribusi sebagian dari itu, tapi produk mereknya berbeda nanti," ujar Erick dalam keterangannya.

Menurut Erick, anak usaha PTPN Group, INL, tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) yakni migor. Kemasan migor sederhana INL ini baru dikembangkan saat harga minyak sawit melambung tahun lalu. "Kita pakai *brand* INL karena ini khusus *brand* ekonomis (*value for money*)," ungkap Erick. Harga migor INL sesuai harapan pemerintah yakni Rp 14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan, 450 mililiter (ml) dan 900 mL. Untuk sementara, migor INL akan lebih dahulu beredar di wilayah Medan dan Sumut.

Erick Thohir

Erick menuturkan, BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana khusus migor untuk pasar tradisional dengan *brand* INL. Mulai Januari 2022, BUMN telah memiliki tiga produk migor dengan segmentasi berbeda, yakni Nusakita 100% *price index* dari *market leader* (Bimoli), Salvaco (92-95% *price index* Bimoli), dan kemasan sederhana INL (88-90% *price index market leader*/Bimoli). "Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," jelas Erick.

Dalam kanal media sosialnya, Erick menuturkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar OP migor dilakukan secara menyeluruh dengan target sekitar 1,2 miliar liter yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp 3,6 triliun. "Untuk merespons itu, Kementerian BUMN *kan* punya PTPN yang salah satu fokusnya mengembangkan industri sawit dengan turunannya berupa migor, sehingga kami putuskan untuk menjadi bagian dari OP guna mengintervensi harga produk tersebut," tutur

> **"BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan minyak goreng kemasan sederhana untuk pasar tradisional dengan *brand* INL.**

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☑ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 11 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Erick.

Menurut Erick, Kementerian BUMN melalui PTPN menargetkan OP migor sebanyak 3,75 juta liter pada Januari-Mei 2022 dengan target awal 750 ribu liter untuk wilayah Sumatera dan Jawa. "Sumatera dan Jawa memang kebutuhan migornya cukup tinggi, saya sempat melihat di Kabupaten Batubara dan Kabupaten Toba, saya rasa memang harus dijaga (harga migor)," kata dia. OP nantinya bisa saja ditingkatkan volumenya, yang pasti tahap pertama sekitar 3,75 juta liter terlebih dahulu. "PTPN sudah punya merek perdagangan resmi yaitu Nusakita, namun untuk OP dibuat dengan merek yang lebih generik karena ini untuk membantu masyarakat," kata dia.

Segera Terkoreksi

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa meyakini, harga migor di pasar domestik akan terkoreksi pada Februari-Maret 2022 seiring turunnya harga minyak nabati dunia. Andreas menuturkan, produksi kedelai Brasil akan meningkat cukup tajam, selama ini kedelai merupakan faktor pengerek terbesar kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit. Brasil mulai panen kedelai pada Januari-Maret 2022. "Kondisi ini kemungkinan besar berpengaruh pada harga migor di dalam negeri," papar Andreas, kemarin.

Menurut Andreas, sejak 2020 hingga saat ini, harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit telah meningkat 24 kali lipat. Dengan terkoreksinya harga minyak nabati dunia seiring peningkatan panen kedelai oleh Brasil diharapkan bisa menurunkan harga migor di Indonesia. "Sebenarnya tidak perlu terlalu dicemaskan karena diperkirakan sekitar Februari-Maret 2022 harga migor akan terkoreksi, apalagi pemerintah bersama pengusaha minyak sawit nasional terus berusaha mengatasi krisis harga migor ini," jelas Andreas.

2

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [x] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 1 /
RUBRIKASI
- [ ] Berita
- [ ] Berita Foto
- [x] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Operasi Pasar saja tidak Cukup

Pemerintah disarankan menerapkan kebijakan domestic market obligation, yakni produsen mengalokasikan 25%-40% CPO untuk pemenuhan stok di dalam negeri.

Hilda Julaika
hilda@mediaindonesia.com

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah tidak akan cukup dalam mengendalikan harga minyak goreng yang terus melonjak di berbagai daerah. MI. 1

"Operasi pasar hanya solusi temporer dan sifatnya menekan harga di hilir, sementara problem utama minyak goreng ialah stabilisasi harga CPO (*crude palm oil*/minyak sawit mentah) di hulu. Jika harga CPO masih mahal, produsen minyak goreng akan menjual dengan harga yang lebih mahal," kata Bhima saat dihubungi, kemarin.

Bhima menyebut pemerintah bisa menerapkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) CPO. Kebijakan itu dilakukan dengan mensyarakatkan produsen mengalokasikan 25%-40% CPO untuk pemenuhan stok di dalam negeri. "Harga DMO juga ditetapkan oleh pemerintah. Sisa CPO di luar kewajiban DMO boleh diekspor," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengutarakan operasi pasar dari pemerintah bisa disertai dengan subsidi minyak goreng. Akan tetapi, harus dipastikan subsidi tersebut benar-benar tersalurkan ke konsumen. "Salah satunya mesti ada pemantauan dan pengawasan terhadap harga di pasar dan ritel, tapi pada saat yang bersamaan juga ada operasi pasar," ujar Faisal.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah melalui BUMN akan melakukan intervensi atau operasi pasar dengan menggelontorkan sekitar 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022.

Menurut Erick, BUMN berperan sebagai penyeimbang pasar, penyeimbang ekonomi, dan juga kadang-kadang harus melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan.

Namun, imbuhnya, hal itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh BUMN sendiri karena BUMN sebagai perusahaan kelapa sawit hanya memiliki 4% *market share* dan mayoritas dipegang swasta.

Menurut Menteri BUMN, anak usaha *holding* perkebunan yakni PT Industri Nabati Lestari (INL) juga tengah mengembangkan produksi turunan CPO untuk pasar tradisional. Harga minyak goreng INL sesuai harapan pemerintah, Rp14.000 per liter.

Tidak berpengaruh

Kenaikan harga minyak goreng hingga kemarin terpantau masih terjadi di sejumlah pasar. Mulai dari di Penajam yang nantinya merupakan wilayah ibu kota negara, lalu Sikka, Sorong, Jambi, Banyumas, Sukabumi, Pasuruan, Kupang, Bandung, hingga Semarang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah memulai operasi pasar agar harga minyak goreng yang melambung di kisaran Rp20.000 per liter dapat turun menjadi Rp14.000 per liter. "Sesuai perintah ibu-ibu, harga minyak goreng coba diturunkan melalui operasi pasar," ungkapnya di *Instagram*, kemarin.

Namun, kenyataannya operasi

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☑ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2021
HALAMAN 1 /
RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☑ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Harga Minyak Goreng belum Terkendali

Harga Minyak Goreng di Beberapa Provinsi
(Data 9 Januari 2021)

Provinsi	Harga/Kg
DKI Jakarta	Rp20.650
Jawa Tengah	Rp19.300
Jawa Barat	Rp19.950
Aceh	Rp20.500
Gorontalo	Rp26.350

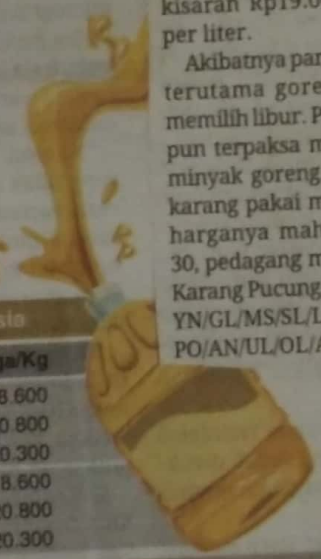

Rerata Harga Minyak Goreng di Indonesia

Tanggal	Jenis Minyak Goreng	Harga/Kg
6/1	Curah	Rp18.600
	Kemasan Bermerek 1	Rp20.800
	Kemasan Bermerek 1	Rp20.300
7/1	Curah	Rp18.600
	Kemasan Bermerek 1	Rp20.800
	Kemasan Bermerek 2	Rp20.300

Beberapa Upaya Pemerintah Mengembalikan Harga Minyak Goreng

- Melakukan operasi pasar di sejumlah daerah.
- Menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng masuk operasi pasar.
- Kementerian BUMN bekerja sama dengan PT Industri Nabati Lestari dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng.

Sumber: Setpres/Kementerian BUMN/Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional/Litbang MI/ Grafis: SENO

pasar belum terlalu berpengaruh. Meski sudah digelontorkan 70 ribu liter minyak goreng di Jawa Tengah, misalnya, harga tetap bertengger di kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per liter.

Akibatnya para pedagang makanan terutama gorengan menjerit dan memilih libur. Para ibu rumah tangga pun terpaksa mengurangi konsumsi minyak goreng. "Harus lebih irit sekarang pakai minyak goreng karena harganya mahal," keluh Basriyah, 30, pedagang makanan di Kelurahan Karang Pucung, Purwokerto. (Ins/Ant/YN/GL/MS/SL/LD/YH/BB/FL/JS/AD/TS/PO/AN/UL/OL/AS/X-11)

2

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [x] Perkebunan
- [ ] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [x] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 1 /
RUBRIKASI

- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

BUMN Siapkan 3,7 Juta Liter Minyak Goreng

■ IIT SEPTYANINGSIH, MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan perusahaan pelat merah akan melakukan intervensi atas kenaikan harga minyak goreng. Ada sebanyak 3,7 juta liter minyak goreng yang bakal disalurkan melalui operasi pasar hingga Mei 2022.

Erick mengatakan, BUMN memiliki peran sebagai penyeimbang pasar, penyeimbang ekonomi, dan terkadang harus melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan. "BUMN melakukan operasi pasar, artinya kami melakukan intervensi. Sampai Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng," ujar Erick di Universitas Sumatera Utara di Medan, yang dipantau secara daring, Ahad (9/1)

Ia menceritakan, peran yang sama juga dilakukan BUMN ketika harga masker melambung tinggi di masa awal pandemi Covid-19. Kala itu, Kimia Farma melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga masker.

BERITA TERKAIT

DPR Dukung Minyak Goreng Bersubsidi

Erick menjelaskan, peran BUMN dalam menyeimbangkan ekonomi amat penting. Menurut dia, kenaikan harga minyak goreng karena naiknya harga kelapa sawit telah membuat konsumen risau. Sebaliknya, jika harga kelapa sawit jatuh, justru petani dan pengusaha yang resah.

"Inilah ekonomi. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo menugaskan tidak hanya kepada BUMN, tapi kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng," kata Erick.

Ia menekankan, upaya untuk menstabilkan harga minyak goreng tidak bisa hanya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Sebab, BUMN yang bergerak di bidang kelapa sawit hanya memiliki pangsa pasar sekitar 4 persen, sedangkan mayoritas dimiliki perusahaan swasta.

Operasi pasar minyak goreng oleh perusahaan BUMN sudah berjalan. Pada Sabtu (8/1), Erick pun meninjau langsung operasi pasar tambahan yang dilakukan PTPN di Kuala Tanjung, Sumatra Utara. "Sesuai arahan Presiden, Kementerian BUMN dan PTPN melakukan operasi pasar tambahan. Dari target total 1,2 miliar liter, kita juga akan kontribusi sebagian dari itu, tapi produk mereknya berbeda," ujar Erick.

Kata Erick, anak usaha *holding* BUMN perkebunan, yaitu PT Industri Nabati Lestari (INL), tengah mengembangkan produksi turunan CPO. Kemasan sederhana INL dikembangkan saat harga minyak melambung tahun lalu. "Kita pakai *brand* INL karena ini khusus *brand* ekonomis," ungkapnya.

Erick menyebutkan, harga minyak INL sesuai harapan pemerintah, yakni Rp 14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan, yaitu kemasan 450 ml dan 900 ml. Erick menegaskan, BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana khusus untuk pasar tradisional dengan *brand* INL. "Untuk sementara akan beredar wilayah Medan dan Sumut dulu," ucap Erick.

Adapun mulai Januari 2022, Erick mengatakan, BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda, yakni Nusakita 100 persen *price index* dari *market leader* (Bimoli), Salvaco (92-95 persen *price index* Bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen *price index market leader*/Bimoli). "Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," kata Erick.

Harga minyak goreng di berbagai daerah hingga saat ini masih tinggi. Belum tampak ada penurunan harga kendati pemerintah telah melakukan upaya stabilisasi harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menjelaskan, usaha stabilisasi belum bisa berdampak langsung. Ia mengatakan, pemerintah melakukan operasi pasar sebanyak 11 juta liter dengan harga Rp 14 ribu per liter.

"Walaupun telah dilaksanakan melalui berbagai OP, tidak akan dapat menurunkan harga minyak goreng. Hal itu karena kenaikan harga bukan karena spekulan, tetapi lebih karena harga bahan baku yang naik," kata Oke kepada *Republika*, Ahad (9/1).

Ia melanjutkan, pemerintah berencana menyediakan minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 200 juta liter dengan harga Rp 14 ribu. Produk tersebut lebih diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan lebih mengendalikan harga supaya tidak menjadi liar.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menyatakan, pemerintah masih melakukan operasi pasar untuk 11 juta liter minyak goreng di 47 ribu gerai pasar modern. Per 5 Januari 2022, OP sudah mencapai 4 juta liter. Produksi minyak goreng kemasan sederhana juga akan diperbanyak dengan melibatkan 70 perusahaan dan 225 *packer*.

Pada tahap awal, pemerintah bekerja sama dengan lima industri minyak goreng besar. "Kita meminta lima perusahaan besar terlebih dahulu untuk mengalokasikan minyak goreng kemasan sederhana agar ini bisa jalan," ujar dia. Pihaknya menargetkan distribusi minyak goreng itu dapat menjangkau seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian

Dipindai dengan CamScanner

Perdagangan.

Walau menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, Lutfi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan minyak goreng kemasan premium. "Jangan sampai minyak goreng semua jadi kemasan sederhana, yang premium jadi tidak ada," kata dia.

Kementerian Perdagangan, tegasnya, memastikan semua barang memiliki harga keseimbangan. "Minyak goreng kemasan sederhana disediakan supaya harganya terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data pada *hargapangan.id*, rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerek berada di kisaran Rp 20.800 per liter pada Jumat (7/1). Adapun minyak goreng curah sebesar Rp 18.600 per liter.

Masih tingginya harga minyak goreng membuat para pedagang terpaksa menaikkan harga jual produk untuk menghindari kerugian. Berdasarkan pantauan *Republika* di Pasar Baru Indramayu, akhir pekan lalu, harga minyak goreng dijual Rp 20 ribu per liter di tingkat konsumen. Namun, untuk pembelian dua liter, harga minyak goreng mencapai Rp 39 ribu. Harga itu melonjak tinggi dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya di kisaran Rp 13 ribu per liter.

Pedagang gorengan pun sangat terdampak dengan mahalnya harga minyak goreng. Pasalnya, minyak goreng merupakan salah satu bahan utama untuk memproduksi gorengan mereka. "Awalnya berusaha tidak menaikkan harga jual karena pembeli pasti protes. Tapi, lama kelamaan, ya, berat. Modal *kan* bertambah besar," kata Casim, salah seorang pedagang *fried chicken* di Kelurahan Margadadi, Indramayu, Jawa Barat.

Casim pun akhirnya terpaksa ikut menaikkan harga jual produknya dari Rp 8.000 per potong menjadi Rp 9.000. "Naik Rp 1.000 saja, pelanggan protes. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Minyak gorengnya mahal," ujar Casim.

Hal senada diungkapkan pedagang bawang goreng di Pasar Baru Indramayu, Opik. Selain berjualan sayuran segar, dia juga biasa berjualan bawang goreng yang dibuatnya sendiri. Biasanya, Opik menjual bawang gorengnya dengan harga Rp 15 ribu per bungkus. Namun, dia kini menaikkan harga jual bawang gorengnya menjadi Rp 16 ribu per bungkus.

■ lilis sri handayani **ed:** satria kartika yudha

Dipindai dengan CamScanner

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [ ] Perkebunan
- [x] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [x] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 11 /
RUBRIKASI
- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Pemberantasan Mafia Pupuk Didukung

PUPUK Indonesia mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung memberantas oknum-oknum yang menyalahgunakan program pemerintah terkait penyediaan pupuk dan bisa berdampak pada kerugian masyarakat, khususnya petani.

"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam artian, kami juga mendukung upaya-upaya itu. Kami mendukung dan menyambut gembira pernyataan Pak Jaksa Agung," kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerjanya untuk melaksanakan operasi intelijen dalam rangka memberantas mafia pupuk. "Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk," kata Jaksa Agung Burhanuddin.

Wijaya mengatakan Pupuk Indonesia siap mendukung Kejaksaan Agung dalam hal apa pun terkait kegiatan tersebut. Selama ini, terdapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri atas berbagai unsur, termasuk kejaksaan, yang fungsinya untuk mengawasi penyaluran pupuk.

"Jadi, selama ini memang fungsi pengawasan ini yang perlu ditingkatkan. Jadi, kalau ada upaya dari Kejaksaan Agung, kami siap *support* dalam hal apa pun," kata Wijaya.

Menurut Wijaya, keberadaan oknum yang melakukan penyelewengan dalam program penyediaan pupuk merugikan petani, seperti menyulitkan petani memperoleh pupuk, pupuk yang dipalsukan, atau pupuk subsidi yang dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga di atas seharusnya.

Wijaya berharap tindakan pemberantasan oknum dalam penyediaan pupuk dapat semakin memperlancar pendistribusian pupuk di lapangan.

Dia mengakui bahwa pengawasan pupuk di lapangan tidak bisa dilakukan oleh Pupuk Indonesia sebagai produsen, tetapi butuh dukungan dari berbagai pihak. "Kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah penyimpangan atau penyelewengan pupuk di lapangan," katanya.

Pupuk Indonesia juga telah menerapkan berbagai sistem dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, salah satunya lewat digitalisasi, sistem *monitoring* untuk distribusi pupuk, dan bekerja sama dengan aparat di daerah dalam hal pendistribusian. (Ant/E-3)

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [ ] Perkebunan
- [x] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [ ] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [x] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 9/1/2022
HALAMAN 3 /
RUBRIKASI

- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

Jaksa Agung Minta Mafia Pupuk Diberantas

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerja kejaksaan untuk melaksanakan operasi intelijen. Operasi itu digelar dalam rangka memberantas mafia pupuk.

"Ungkap adanya mafia pupuk. Rakyat butuh keberadaan pupuk," kata Burhanuddin, kemarin.

Arahan tersebut disampaikan Burhanuddin saat kunjungan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (7/1). Dalam arahannya, Burhanuddin menyampaikan Jambi memiliki peranan penting dalam penyediaan stok pangan di Indonesia.

Berdasarkan data situs Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Jambi mendapatkan penghargaan di bidang pertanian pada 2021. Jambi menduduki peringkat kelima dalam kategori peningkatan produksi beras tertinggi 2020-2021.

Jambi juga tercatat menjadi provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021. Pada kategori itu Jambi menduduki peringkat ketiga.

Menurut Burhanuddin, hal itu merupakan prestasi yang membanggakan dan sudah sepatutnya dipertahankan. Bahkan, dia meminta prestasi itu ditingkatkan mengingat potensi Jambi di bidang agraris cukup menjanjikan.

"Berdasarkan hal tersebut, untuk keberadaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, memegang peranan penting dalam menopang prestasi Jambi sebagai lumbung pangan peringkat tiga nasional," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menekankan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan. Dia tidak ingin kejadian di Kabupaten Blora terkait dengan kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi terjadi di daerah lainnya.

"Hal tersebut sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu stabilitas ekonomi," ujar Burhanuddin. MI. 9/1/3

Sebelumnya saat kunjungan kerja ke Trenggalek, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat keluhan langsung dari petani di terkait dengan ketersediaan pupuk. Dia berjanji segera menangani keluhan itu.

"Tadi ada keluhan-keluhan dari para petani, terutama berkaitan dengan pupuk yang berkaitan dengan alat produksi. Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta," ujar Jokowi, Selasa (30/11/20).

Jokowi tak ingin masalah itu terus berlarut-larut. Masalah itu sudah dibahas dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan seluruh pemangku kepentingan terkait setibanya di Jakarta.

Kepala Negara akan meminta solusi atau terobosan dari Mentan Syahrul Yasin Limpo. Dengan begitu, masalah ketersediaan pupuk yang dialami petani segera terselesaikan. (Tri/P-1)

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- [ ] Tanaman Pangan
- [ ] Hortikultura
- [ ] Peternakan dan Kesehatan Hewan
- [ ] Perkebunan
- [x] Prasarana dan Sarana Pertanian
- [ ] Litbang Pertanian
- [ ] Ketahanan Pangan
- [ ] Karantina Pertanian
- [ ] Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- [ ] Pertanian Umum

MEDIA

- [ ] Agro Indonesia
- [x] Bisnis Indonesia
- [ ] Indo Pos
- [ ] Investor Daily
- [ ] Jurnal Nasional
- [ ] Kompas
- [ ] Kontan
- [ ] Koran Jakarta
- [ ] Koran Tempo
- [ ] Majalah Tempo
- [ ] Media Indonesia
- [ ] Pelita
- [ ] Rakyat Merdeka
- [ ] Republika
- [ ] Seputar Indonesia
- [ ] Sinar Harapan
- [ ] Sinar Tani
- [ ] Suara Karya
- [ ] Suara Pembaruan
- [ ] The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 5 /
RUBRIKASI

- [x] Berita
- [ ] Berita Foto
- [ ] Opini/Artikel
- [ ] Tajuk
- [ ] Pojok/Karikatur

GEJOLAK PUPUK NONSUBSIDI

PEMERINTAH JANJI 'JINAKKAN' HARGA

Nyoman Ary Wahyudi
redaksi@bisnis.com

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan produsen pupuk dalam negeri untuk menjaga harga pupuk nonsubsidi tetap stabil di tengah gejolak harga bahan baku di pasar global.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim mengatakan produsen pupuk dalam negeri bisa menawarkan harga di bawah harga internasional guna menjaga akses pupuk bagi para petani.

Sejauh ini, dia memproyeksikan harga pupuk nonsubsidi bakal mengalami kenaikan sepanjang 2022 akibat melonjaknya harga bahan baku di tingkat global.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk turut andil mempengaruhi inflasi pada komoditas pangan awal tahun ini. B1.5

"Meskipun terjadi sedikit penurunan pada pupuk Urea pada periode Desember 2021 sebesar 1,11% dibandingkan November 2021, namun kenaikan masih terjadi pada *diamonium fosfat* sehingga diperkirakan pupuk NPK masih akan terus mengalami kenaikan sepanjang 2022," katanya, Minggu (9/1).

Berdasarkan data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan *diamonium fosfat* (DAP) mengalami kenaikan yang signifikan.

Sepanjang Januari hingga Desember 2021, harga diamonium fosfat di pasar internasional mengalami kenaikan sebesar 76,95%. Saat awal 2021, harga pupuk jenis itu mencapai US$421 per ton. Pada akhir 2021, harga pupuk jenis itu berakhir di posisi US$745 per ton.

Di sisi lain, Pupuk Urea mengalami peningkatan harga mencapai 235,85% sepanjang 2021. Pupuk Urea sempat berada di harga US$265 per ton dan belakangan naik menjadi US$890 per ton pada Desember 2021.

"Kenaikan harga pupuk nonsubsidi disebabkan oleh melonjaknya harga berbagai komoditas dunia seperti amonia, *phosphate rock*, KCL, gas dan minyak bumi karena pandemi, krisis energi di Eropa serta adanya kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya," kata Isy.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Achmad Tossin Sutawikara menyatakan stok pupuk bersubsidi di setiap gudang lini 3 atau kabupaten terpenuhi seiring dengan tren kenaikan harga pupuk nonsubsidi pada awal tahun ini.

Menurutnya, ketersediaan pupuk bersubsidi per 7 Januari 2022 mencapai 130% dibandingkan dengan ketentuan stok minimum.

"Stok lebih besar dari stok minimum yang ditentukan Permentan [peraturan menteri pertanian]," kata Tossin.

Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) melaporkan tren kenaikan harga pupuk nonsubsidi sudah berlangsung sejak Oktober 2021.

Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI Kusnan mengatakan harga pupuk nonsubsidi mengalami kenaikan hingga 100% pada pekan pertama Januari 2022.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani atau NTP pada 2021 masih berada di bawah standar

1

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☑ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☑ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 5 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

impas.

"Harga pupuk nonsubsidi sekarang naiknya tidak wajar sampai 100% yang awalnya pada 2020 akhir harganya hanya Rp280.000 per sak [50 kilogram] pupuk Urea, tapi sekarang sampai Rp500.000 per sak bahkan di luar Jawa tembus Rp600.000," kata Kusnan.

Berdasarkan catatan SPI, harga pupuk Urea pekan pertama Januari 2022 sudah mencapai Rp560.000 per sak.

Saat situasi normal, harga pupuk itu berada di posisi Rp265.000 hingga Rp285.000 per sak.

Selama Oktober-November 2021, harga pupuk itu mengalami kenaikan menjadi Rp380.000. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000.

Selain itu, dia mencatat harga pupuk NPK juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dia mencontohkan NPK Mutiara mengalami kenaikan harga mencapai Rp600.000 per sak dari harga sebelumnya di posisi Rp400.000 per 50 kilogram.

Untuk NPK Phonska mengalami kenaikan menjadi Rp260.000 per sak dengan 25 kilogram dari harga awal Rp170.000 per sak.

JUAL RUGI

Sebaliknya, harga komoditas seperti padi tidak kunjung membaik. Bahkan, harga beras di tingkat penggilingan masih Rp8.000 per kilogram. "Kalau petani jual rugi, tidak impas tidak dapat apa-apa, tapi komoditas jagung, petani masih dapat karena harga jual lumayan," kata dia.

Selain kenaikan harga pupuk nonsubsidi, dia menambahkan pendapatan petani juga tergerus kenaikan biaya buruh tani dan juga pestisida yang sebagian besar masih digunakan oleh petani konvensional.

"Karena harga mahal, produktivitasnya juga jelas akan berkurang jelas pendapatan juga akan berkurang," tuturya.

Sebelumnya, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gunawan berjanji menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk subsidi dan nonsubsidi. Langkah itu merespons keluhan petani sawit setelah harga pupuk nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan tahun ini.

Menurutnya, pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Alasannya, pasokan pupuk berdampak sosial yang luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6.063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi.

"Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi," ujarnya belum lama ini.

Berdasarkan data Ditjen Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 juta—26,18 juta ton atau senilai Rp63 triliun—Rp65 triliun dalam 5 tahun terakhir. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta—9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp25 triliun—Rp32 triliun.

Dari Lombok Tengah, Pupuk bersubsidi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dijual dengan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp225.000 per kuintal.

"Namun faktanya di lapangan masih ada oknum pengecer yang menjual Rp270.000 per kuintal," kata Wakil Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah H Acih seperti dikutip *Antara*.

Menurutnya, rata-rata di wilayah Kecamatan Praya Timur, Pujut, Janapria dan kecamatan lainnya, masih ada oknum pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

Selain itu, para petani juga dipaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp15.000 per kilogram, meski itu tidak banyak.

"Penjualan pupuk bersubsidi itu digandeng dijual dengan pupuk nonbersubsidi kepada petani," katanya. ■

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☑ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☑ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 8 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

ASN Musi Banyuasin Wajib Konsumsi Beras Lokal

PRODUKSI beras lokal di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, terus meningkat. Untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka bagi produksi pertanian, pemerintah kabupaten mengajak aparatur sipil negara berbelanja beras lokal.

"Kita lindungi petani dari jaringan tengkulak. Mari kita bela petani dengan cara membeli beras produksi mereka," kata Plt Bupati Beni Hernedi, kemarin.

Salah satu cara agar beras lokal dapat terserap dengan baik, sambung dia, ialah mengajak seluruh ASN membeli beras lokal. "Ini sudah kita lakukan, namun harus lebih dimaksimalkan lagi. Tahun ini, kami integrasikan lagi ke seluruh organisasi perangkat daerah."

Melindungi petani, kata Beni, sangatlah penting dilakukan karena para petani memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. "Pertanian ini adalah potensi daerah. Pertanian sangat penting sebagai persiapan jika potensi migas di Muba habis. Tanpa migas, pertanian akan jadi penopang," tandasnya. MI-B

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Thamrin, mengaku sudah membuat surat edaran agar beras lokal dibeli oleh organisasi perangkat daerah untuk ASN. "Saat ini memang sudah berjalan, tapi harus dimaksimalkan, ditingkatkan," ujarnya.

Di Badung, Bali, Kapolres Ajun Komisaris Besar Leo Dedy Defretes tidak mau membiarkan ada lahan yang tidur di wilayahnya. Dengan menggulirkan program polisi berkebun, polisi di tingkat kecamatan digerakkan untuk menanami lahan kosong.

Setelah panen di Kuta Utara dan Abiansemal, polisi berkebun juga menuai hasil di Desa Belok Sidan. "Kami panen timun dan tomat," kata Leo.

Tidak ingin bergantung pada pemerintah terus-menerus, petani di pinggiran Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, secara swadaya membuka jalan pertanian dan perkebunan. Jalan baru itu menjadi jalan alternatif.

"Kami sudah merintis pembukaan jalan sejak 2018. Alhamdulillah saat ini sudah tembus ke Kecamatan Matur. Keberadaan jalan mempermudah akses warga ke lahan pertanian dan kebun sekaligus sebagai jalan alternatif," ujar Ketua Kelompok Tani Kararimbang, Erni. (DW/OL/YH/N-2)

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☑ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☑ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 7 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Kenaikan Kebutuhan Pokok Tambah Beban Rakyat

Puan: Segera Kendalikan Harga

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah mengendalikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng. Tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok menambah beban rakyat di masa pandemi Covid-19.

"BEBERAPA kebutuhan pokok, seperti telur, bawang, dan cabe harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan, minyak goreng masih mahal, meski pemerintah sudah memberi acuan harga Rp 14 ribu per liter," sesal Puan melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jauh-jauh hari meminta jajarannya mengendalikan harga kebutuhan pokok. Namun, sejumlah harga kebutuhan pokok masih mahal, meski sudah memasuki pekan kedua Tahun 2022.

"Berbagai kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda), harus bekerja cepat dalam merealisasikan arahan Bapak Presiden. Segera kendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk dapat mengurangi beban rakyat di masa pandemi Covid-19," tegas dia. RM.7

Khusus minyak goreng, Puan meminta pemerintah menyalurkan minyak goreng bersubsidi secara merata. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran tak kunjung turun, masih berkisar Rp 20 ribu per liter. Para Pedangang di pasar tradisional menjual minyak dengan harga tinggi, karena masih mendapat harga mahal dari agen.

"Minyak subisidi masih langka di pasaran, baik pasar tradisonal maupun ritel. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat, karena masyarakat belum merasakan program tersebut. Penyaluran minyak bersubsidi harus merata di seluruh daerah, agar dapat dirasakan oleh rakyat," tutur dia.

Puan juga meminta pemerintah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) untuk pemda, terkait penyaluran minyak goreng murah. Dengan begitu, pemda dapat bergerak cepat dalam menerapkan program minyak goreng subsidi di wilayahnya. "Pemda harus menggelar sebanyak mungkin operasi minyak goreng, untuk membantu masyarakat, khususnya warga kelas menengah ke bawah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mantan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menilai, tingginya harga minyak goreng merupakan sebuah ironi di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Ia pun menyoroti bagaimana negara tetangga, Malaysia, memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik. Pemerintah Negeri Jiran menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp 8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.

"Negara harus memastikan, rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Air-nya tanpa kesulitan. Karenanya, kami berharap, pemerintah memberi subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat, dan menstabilkan harga pangan untuk mengurangi beban rakyat," tandasnya. ■ ONI

Speaker Quote

"Beberapa kebutuhan pokok, seperti telur, bawang, dan cabe harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan, minyak goreng masih mahal, meski pemerintah sudah memberi acuan harga Rp 14 ribu per liter."

■ Ketua DPR, **Puan Maharani**

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☑ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☑ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10 / 1 / 2022
HALAMAN 14 /
RUBRIKASI
- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Stok Pangan Mulai Tipis, Impor Pangan Dilirik

Kemdag tengah menyiapkan izin impor untuk daging sapi, gula, dan bawang putih

Abdul Basith Bardan, Ratih Waseso, Vendy Susanto

JAKARTA. Setiap awal tahun, harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Salah satu yang sering menjadi alasan adalah soal stok pangan yang tipis di awal tahun karena mengandalkan sisa produksi tahun sebelumnya.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) bakal terus memantau secara intensif terkait pasokan masing-masing komoditas pangan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Direktur Bahan Pokok dan Penting Kemdag Isy Karim mengungkapkan, untuk penyediaan bahan pangan, pemerintah selalu mengutamakan produksi atau pengadaan dari dalam negeri. Sedangkan, impor menjadi opsi terakhir

Kemdag telah berupaya mengantisipasi sejak dini krisis pasokan di awal tahun dengan menerbitkan izin impor kebutuhan bahan pokok yang pemenuhannya belum sepenuhnya dari dalam negeri seperti gula, daging sapi (sapi bakalan dan daging beku) dan bawang putih sesuai kebutuhan dan persetujuan dari kementerian teknis. KN. KJ

"Kami akan memastikan realisasi impor dan kelancaran distribusi komoditi tersebut ke pasar agar tidak terjadi kekurangan pasokan di masyarakat. Terutama antisipasi kebutuhan hingga masa puasa dan Lebaran tahun 2022 yang akan jatuh April-Mei," ujar dia, Minggu (9/1).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Suhandri memastikan stok daging masih mencukupi untuk kebutuhan dua bulan ke depan. Pihaknya juga menyiapkan stok daging jika tiba-tiba terjadi peningkatan permintaan.

Suhandri belum dapat memastikan apakah Aspidi akan segera mengajukan izin impor daging beku. Yang jelas agar tidak terlambat masuk, keputusan ini akan ditentukan pada Februari 2022.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, stok gula di awal tahun 2020 sekitar 1,2 juta ton. Jumlah ini dianggap cukup memenuhi kebutuhan gula konsumsi hingga panen tebu tiba pada pertengahan tahun ini. Adapun, rata-rata konsumsi gula nasional per bulan adalah 220.000 ton. ■

1

Dipindai dengan CamScanner

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☑ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☑ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☑ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☑ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 14 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Permintaan Garam Stagnan

ASOSIASI Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) memperkirakan belum ada perubahan dalam kebutuhan garam industri tahun 2022. Industri pengguna garam masih belum pulih maksimal setelah produksinya merosot sekitar 40% selama pandemi Covid-19.

Alhasil, kebutuhan garam industri tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. "Kebutuhan garam industri 2022 relatif sama dengan 2021, 2020, dan 2019," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk Minggu (9/1).

Tony menyatakan bahwa kebutuhan garam dari industri *chlor alkali plant* (CAP) sebesar 2,5 juta ton per tahun. Selain itu industri aneka pangan 650.000 ton, konsumsi 650.000 ton, dan industri lainnya 500.000 ton, sehingga total 4,3 juta ton per tahun. Selain impor, industri juga berjanji membeli garam produksi lokal sebanyak 1,1 juta ton sepanjang tahun 2022. ■

Ketersediaan Pangan di Awal Tahun 2022

Jenis Bahan Pangan	Stok Pangan (Ton)
Beras	1.990.000
Jagung	1.439.000
Bawang Merah	128.000
Bawang Putih	195.000
Daging Sapi/ Kerbau	168.000
Daging Ayam Ras	377.000
Gula	1.150.000
Minyak Goreng	618.000
Telur Ayam Ras	23.000
Cabai Rawit	14.000
Cabai Besar	17.000

Sumber: Kemtan dan Riset KONTAN

2

Dipindai dengan CamScanner

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☑ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☑ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post

TANGGAL 10/1/2022
HALAMAN 7 /
RUBRIKASI

- ☑ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Ekspor Pertanian Naik

Anggaran Petani Kudu Meningkat

MENINGKATNYA pertumbuhan ekspor pertanian di tengah pandemi membuktikan sektor ini selalu menjadi penopang perekonomian nasional. Ekspor pertanian sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 451,77 triliun atau naik 15,79 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menyebut, sektor pertanian di tahun 2021 menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi nasional. "Terutama pada saat pandemi, di mana banyak sektor mengalami keterpurukan, sektor pertanian sangat kokoh. Bahkan PDB (produk domestik bruto) sektor ini tumbuh positif di saat sektor lainnya mengalami kontraksi," kata Akmal, kemarin.

Dia mengapresiasi surplus beras sebesar 9 juta ton di tahun 2021 ini. Kelebihan stok beras ini diharapkan terus meningkat sehingga pada tahun ini Indonesia bisa melakukan ekspor beras. Pada tahun ini, sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan selain kesehatan dan energi.

"Konsekuensinya, mesti ada perbaikan politik anggaran untuk meningkatkan APBN pertanian yang dapat diakomodir melalui perubahan APBN," ucap politisi senior Fraksi PKS ini.

Terpisah, mantan Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol mendorong agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi pusat penyedia kebijakan pemerintah untuk solusi pangan. Langkah ini penting menghadapi dampak ketidakstabilan pangan menyambut perayaan berbagai hari raya nasional.

Adapun ketidakstabilan harga bahan pokok ini disebabkan oleh ketidakseimbangan *supply* dan *demand* serta inefisiensi pengaturan rantai distribusi. Ketidakseimbangan ini terjadi karena adanya peningkatan daya konsumsi yang signifikan dan masif dalam rangka perayaan hari raya.

"Selain itu, lanskap geografis Indonesia yang luas dan tersebar merupakan faktor besar terjadinya rantai distribusi yang panjang, sehingga inefisiensi pengaturan distribusi kerap terjadi," katanya.

Solusi jangka pendek merupakan pendekatan yang ditargetkan untuk hari raya. Sedangkan, solusi jangka panjang terfokus pada menjaga keseluruhan ekosistem pendukung pangan dari hulu hingga hilir. Termasuk skema penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menghindari kerawanan pangan dan gizi.

Sebagai upaya dalam solusi jangka pendek, jelas Iryanto, bisa dilakukan antara lain optimalisasi manajemen distribusi. Terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) pada hari raya seperti operasi pasar oleh Perum Bulog sehingga harga bisa terkendali pada tingkat ritel dan konsumen. RM.7

Sementara solusi jangka panjang merupakan *grand design* untuk menjaga ketersediaan, kestabilan harga, dan ketahanan bahan pangan pokok yang berkelanjutan. Ketersediaan pangan dapat dicapai dengan meningkatkan peran dan kapabilitas operator pangan melalui adopsi teknologi, perluasan jaringan distribusi dan manajemen yang efektif. ■ KAL

Dipindai dengan CamScanner